

PEMBERDAYAAN ISTRI NELAYAN MELALUI KOPERASI UNIT DESA (KUD)
(Studi Pada KUD Mina Jaya Sendang Biru
Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang)

Priskila Mustika Hayuning Pratama Soero, Dwi Sulisty, Ainul Hayat

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang

Email: only_priz@yahoo.com

Abstract: *The Empowerment of Fisherman's Wife through Village Unit Cooperatives (KUD). The coastal communities at Sendangbiru is the traditional society with low condition of socio-economic. This condition need of empowerment programme which can be realized through independence of fisherman's wife who has been accompanied by the KUD Mina Jaya. The purpose of this research is to know, to describe, and to analyze the empowerment of fisherman's wife through the KUD Mina Jaya at Sendangbiru Village, Regency of Malang and its constraints faced. The research method used is descriptive qualitative research method. The results of this research show that the function of Village Cooperatives is helping fisherman's wife to produce shredded tuna. The constraints that faced were limited funds from the KUD and the DKP of Malang Regency making some producers stopped production, socialization and training by the DKP is unsustainable, and the quality of human resources of the KUD and fishermen are still low.*

Key words: *empowerment, fisherman's wife, KUD Mina Jaya*

Abstrak: *Pemberdayaan Istri Nelayan melalui Koperasi Unit Desa (KUD). Masyarakat pesisir di Sendangbiru merupakan masyarakat tradisional dengan kondisi strata sosial ekonomi rendah. Untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat nelayan di pesisir Sendangbiru diperlukan program pemberdayaan yang dapat diwujudkan melalui kemandirian istri nelayan yang didampingi oleh KUD Mina Jaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis pemberdayaan istri nelayan melalui KUD Mina Jaya di Sendang Biru Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang beserta kendala-kendala yang dihadapi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah peran KUD yang memberdayakan istri nelayan dengan membuat abon ikan tuna. Kendala yang dihadapi antara lain adalah dana yang masih terbatas dari KUD dan DKP Kabupaten Malang membuat beberapa produsen abon berhenti produksi, sosialisasi dan pelatihan oleh DKP yang tidak berkelanjutan, serta kualitas SDM dari KUD dan para nelayan yang masih rendah.*

Kata kunci: *pemberdayaan, istri nelayan, KUD Mina Jaya*

Pendahuluan

Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses menuju perubahan yang lebih baik. Untuk itu, pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional.

Pembangunan nasional tidak akan terlepas dari pembangunan daerah karena pembangunan daerah merupakan pendukung terciptanya pembangunan nasional. Dalam pembangunan daerah, sektor kelautan merupakan salah satu sumber daya yang sangat berpotensi mengingat Indonesia adalah negara maritim yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan yang tidak

menutup kemungkinan mata pencaharian sebagian penduduknya adalah nelayan.

Namun model pembangunan dalam sektor kelautan yang selama ini menyebabkan laju perkembangan sektor kelautan dan perikanan berjalan relatif lamban. Kegiatan pemberdayaan merupakan salah satu usaha yang bisa dilakukan untuk menunjang pembangunan khususnya pembangunan di sektor kelautan.

Indonesia memiliki wilayah pesisir yang tersebar. Salah satu wilayah yang memiliki 14 pantai adalah Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sumbermanjing Wetan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Malang yang memiliki pantai terpanjang bila dibanding dengan kecamatan lainnya. Pantai tersebut adalah Pantai

Sendang Biru. Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai nelayan.

Pada umumnya masyarakat desa pesisir lebih merupakan masyarakat tradisional dengan kondisi strata sosial ekonomi yang sangat rendah (Pramono, 2005, h.16-17). Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir khususnya masyarakat nelayan ini sering dikategorikan sebagai masyarakat yang biasa bergelut dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Permasalahan pokok yang ada pada masyarakat nelayan yang bermukim di wilayah pesisir adalah masih rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan kelautan, pemilikan modal serta manajemen usaha perikanan yang dimiliki.

Masalah sosial ini dapat mengurangi arus proses pembangunan nasional nantinya. Untuk itu diperlukan program pemberdayaan yang dapat diwujudkan melalui kemandirian masyarakat nelayan sehingga ketika nelayan tidak melaut, setidaknya mereka masih memiliki keahlian atau *skill* lain yang bisa dipergunakan untuk pekerjaan sampingan.

Program pemberdayaan dapat diwujudkan melalui kemandirian para istri nelayan. Dalam upaya program pemberdayaan para istri nelayan ini, terdapat agen yang akan mendampingi dan akan menjadi fasilitator yang bersifat multi-disiplin. Ialah Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Jaya yang selama ini menjadi lembaga alternatif bagi masyarakat nelayan di Sendang Biru untuk memperoleh akses modal, teknologi penangkapan maupun barang kebutuhan sehari-hari.

Tinjauan Pustaka

a. Konsep dan Definisi Pembangunan

Bryant dan White (dikutip oleh Suryono, 2004, h.35) mendefinisikan pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam mempengaruhi masa depannya. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pembangunan tidak hanya menyangkut perubahan fisik dan konkret, namun pembangunan lebih ditekankan dari segi manusianya sendiri, sehingga masyarakat memiliki kemampuan yang lebih berkapasitas besar dan berkualitas.

b. Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Tahapan pemberdayaan berfungsi untuk memandirikan masyarakat dalam berbagai kegiatannya karena seperti yang dikemukakan Sumodiningrat (dikutip oleh Sulistiyani, 2007, h.78), bahwasanya suatu pemberdayaan dalam masyarakat tidak akan bersifat selamanya, melainkan pemberdayaan tersebut berlangsung sampai masyarakat dirasa mampu untuk hidup

mandiri namun tetap dipantau dari kejauhan agar bisa tetap stabil dan tidak terjatuh lagi.

Jika dilihat dari pendapat di atas, suatu pemberdayaan melalui proses belajar hingga mampu mencapai status mandiri. Selanjutnya, Sulistiyani (2007, h.83) mengatakan bahwa pemberdayaan merupakan proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui adalah:

- 1) Tahap pembentukan perilaku menuju perilaku yang sadar dan peduli sehingga setiap pribadi akan merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan dan memberikan ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran dalam pembangunan.
- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan ketrampilan sehingga terbentuk inisiatif dan kemampuan berinovasi untuk menuju kemandirian.

Sedangkan menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007, h.1), dengan menekankan pada proses, maka pemberdayaan masyarakat memiliki tahap-tahap sebagai berikut:

1. Penyadaran

Pada tahap ini dilakukan sosialisasi terhadap komunitas agar mereka mengerti bahwa kegiatan pemberdayaan ini penting bagi peningkatan kualitas hidup mereka, dan dilakukan secara mandiri (*self help*).

2. Pengkapasitasan

Sebelum diberdayakan, komunitas perlu diberikan kecakapan dalam mengelolanya. Tahap ini sering disebut sebagai *capacity building*, yang terdiri atas pengkapasitasan manusia, organisasi, dan sistem nilai.

3. Pendayaan

Pada tahap ini target diberikan daya, kekuasaan, dan peluang sesuai dengan kecakapan yang sudah diperolehnya.

c. Indikator Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Kusnadi (2006, dikutip oleh Widayati, 2008, h.31) mengatakan bahwa ada beberapa indikator kualitatif yang menandai suatu masyarakat nelayan memiliki keberdayaan, yaitu:

- a. Tercapainya kesejahteraan sosial-ekonomi baik dalam individu itu sendiri, rumah tangga maupun dalam masyarakat
- b. Kelembagaan ekonomi berfungsi optimal dan aktivitas ekonomi stabil.
- c. Kelembagaan sosial berfungsi dengan baik sebagai instrumen pembangunan lokal.

- d. Berkembangnya kemampuan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi baik dalam hal mendapatkan informasi dan kemampuan menggunakan teknologi.
- e. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan tumbuhnya kesadaran warga terhadap persoalan-persoalan pembangunan yang ada di kawasan pesisir.
- f. Kawasan pesisir menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dan ekonomi nasional yang dinamis, serta memiliki daya tarik investasi.

d. Kendala dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Mengutip Hakim, (diakses 12 Oktober 2012) kendala dalam upaya pemberdayaan oleh lembaga-lembaga formal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan antara lain:

- 1) **Rendahnya sumber daya manusia (SDM)**
Masyarakat nelayan yang menjadi sasaran pemberdayaan umumnya merupakan nelayan tradisional yang tergolong berpendidikan dan berpenghasilan rendah. Secara psikologis, mereka cepat puas dengan apa yang diperolehnya, sehingga mereka tidak tertarik dengan program-program pemberdayaan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga formal.
- 2) **Program hibah**
Adanya anggapan masyarakat nelayan tradisional umumnya bahwa bantuan pemerintah tidak perlu dikembalikan. Akibatnya penggunaan bantuan itu tidak optimal. Kurangnya sosialisasi dan pendekatan terhadap masyarakat sasaran merupakan salah satu pemicu timbulnya anggapan tersebut selain budaya tradisional yang menganggap bahwa menjadi kewajiban pemerintah menyalurkan dana gratis dan juga karena tingkat pendidikan yang rendah.
- 3) **Kelembagaan**
Dalam penyaluran dana pemberdayaan, program yang akan dan sudah berjalan, menganggap bahwa semua masyarakat nelayan sasaran program memiliki nilai sosial yang sama. Hal ini kurang memahami perlunya lembaga yang harus dibentuk tanpa dilakukan identifikasi masing-masing lokasi sasaran berdasarkan kondisi sosial masyarakatnya.
- 4) **Lemahnya pendampingan**
Untuk melakukan sosialisasi, fasilitasi dan pendampingan, umumnya dibentuk dan diberdayakan Tenaga Pendamping Program (TPP) masing-masing lokasi sasaran. Tetapi kenyataannya, proses pendampingan oleh TPP dan supervise oleh KM ini pada tataran teknis pelak-sanaan masih mengedepankan

sistem *up down* dan kurang mampu berintegrasi dengan masyarakat sasaran.

5) Peran tengkulak dan rentenir

Tidak dapat dipungkiri, bahwa masyarakat nelayan tradisional umumnya masih terikat secara moral dalam tradisi patron-klien. Segala kebutuhan klien dalam usaha perikanan yang dilakukannya dipenuhi oleh patron sebagai pemilik modal atau sebagai penguasa usaha lokal. Sistem ini selain menjerat nelayan tradisional, juga memberikan kekuatan pandangan bagi mereka bahwa menerima apa yang dibutuhkan dari patron lebih mudah dibandingkan dengan menerima bantuan dari program pemberdayaan.

6) Pinjaman kurang mencukupi kebutuhan

Modal bantuan program pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga formal umumnya terbatas dan dibatasi. Dampaknya, modal yang diberikan tidak memberikan efek yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sasaran.

e. Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan salah satu pilar perekonomian yang berperan penting dalam pembangunan perekonomian nasional. Menurut Chaniago (dikutip oleh Anoraga dan Widiyanti, 1993, h.27) KUD harus mampu berfungsi sebagai pusat pelayanan dalam kegiatan perekonomian pedesaan yaitu:

- 1) Perkreditan
- 2) Penyediaan dan penyaluran-penyaluran sarana-sarana produksi
- 3) Pengolahan dan pemasaran hasil-hasil produksi dari para anggota KUD dan warga desa umumnya.
- 4) Kegiatan perekonomian lainnya seperti perdagangan, pengangkutan, dan sebagainya.
- 5) Dalam melaksanakan tugas KUD harus benar-benar mementingkan pemberian pelayanan kepada anggota dan masyarakat, dan menghindarkan kegiatan yang menyaingi kegiatan anggota sendiri.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti ingin lebih memahami fenomena yang muncul di masyarakat dalam kasus pemberdayaan masyarakat di Kawasan Sendang Biru melalui Koperasi Unit Desa (KUD). Fokus permasalahan penelitian ini adalah:

1. Pemberdayaan istri nelayan melalui KUD Mina Jaya di Sendang Biru Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang.
 - a. Peran KUD dalam pemberdayaan istri nelayan
 - b. Wujud dan hasil pemberdayaan istri nelayan oleh KUD
2. Kendala-kendala dalam pemberdayaan istri nelayan di Sendang Biru Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, meliputi:
 - a. Dana
 - b. SDM (Sumber daya Manusia) dalam KUD
 - c. Dukungan Dinas terkait
 - d. Sikap istri nelayan (dukungan anggota KUD)

Lokasi penelitian adalah kawasan pesisir Sendang Biru Kabupaten Malang dan situs penelitian yakni Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Jaya, dan Dusun Sendang Biru Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode analisis interaktif menurut Miles dan Huberman (1992, h.16-19) yang meliputi 4 tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi.

Pembahasan

1. **Pemberdayaan Istri Nelayan melalui KUD Mina Jaya di Sendang Biru Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang**
 - a. **Peran KUD dalam Pemberdayaan Istri Nelayan**

KUD Mina Jaya merupakan satu-satunya koperasi yang ada di Dusun Sendang Biru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang sehingga keberadaan KUD Mina Jaya sangat penting bagi kegiatan ekonomi serta kelangsungan hidup masyarakat nelayan di wilayah Kabupaten Malang, khususnya di wilayah Sendang Biru, seperti yang dikemukakan oleh Chaniago (dikutip oleh Anoraga, 1993, h.27) bahwa KUD harus mampu berfungsi sebagai pusat pelayanan dalam kegiatan perekonomian pedesaan.

Program pemberdayaan tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pembangunan, karena pembangunan juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manusia, seperti yang disampaikan oleh Bryant dan White (dikutip oleh Suryono, 2004, h.35) mendefinisikan pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam

mempengaruhi masa depannya. Dengan adanya program pemberdayaan terhadap istri nelayan, diharapkan dapat menambah keahlian yang dimiliki oleh istri nelayan, sehingga kualitas SDM nelayan semakin baik dan kesejahteraan ikut meningkat.

b. Wujud dan Hasil Pemberdayaan Istri oleh KUD

Wujud dan hasil pemberdayaan istri nelayan Sendangbiru adalah abon ikan tuna. Para pembuat abon yakni istri-istri nelayan tersebut membuat abon ikan tuna, kemudian dipasarkan di pasar lokal maupun luar kota, contohnya ke Surabaya, Bali, atau dipandu oleh DKP Kabupaten Malang. Harga abon ikan tuna tersebut cukup terjangkau, bisa dibeli oleh semua kalangan. Namun sangat disayangkan karena hanya dua kelompok yang sanggup bertahan hingga saat ini.

Dengan terjadinya hal tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat nelayan di wilayah Sendangbiru belum dapat diberdayakan dengan baik, karena sebagian dari mereka tidak mampu untuk melanjutkan program pemberdayaan ini, padahal menurut pendapat yang dikemukakan oleh Kusnadi (2006, dikutip oleh Widayati, 2008, h.31) indikator kualitatif yang menandai suatu masyarakat nelayan memiliki keberdayaan, yaitu tercapainya kesejahteraan sosial-ekonomi baik dalam individu itu sendiri, rumah tangga maupun dalam masyarakat, yang ditandai dengan kemandirian ekonomi berkembang dan orientasi kewirausahaan meningkat.

2. **Kendala yang dialami KUD Mina Jaya dalam Pemberdayaan Istri Nelayan di Sendang Biru Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang**
 - a. **Dana**

Dana yang pertama kali dipergunakan dalam pelaksanaan program pemberdayaan pembuatan abon ikan tuna berasal dari dana Dinas Kelautan dan Perikanan serta dana dari KUD Mina Jaya. Dana tersebut digabung kemudian dibagikan kepada lima kelompok istri nelayan yang ikut dalam program pemberdayaan. Namun dana tersebut tidak dapat mencukupi untuk kegiatan produksi abon ikan tuna, sehingga pihak KUD Mina Jaya menggunakan dana internal dari kas koperasi untuk mendukung kegiatan pelatihan pembuatan abon ikan tuna. Maka dari itu dana yang dipakai terbatas. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Hakim, (diakses 12 Oktober 2012) bahwa faktor yang menjadi kendala dalam upaya pemberdayaan salah satunya adalah modal bantuan program pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah

atau lembaga-lembaga formal umumnya terbatas dan dibatasi. Akibatnya, kebutuhan yang harus dipenuhi dalam meningkatkan usaha atau mengembangkan usaha kurang mencukupi.

b. SDM (Sumber Daya Manusia) dalam KUD

Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di KUD Mina Jaya rata-rata lulusan SMA/ sederajat dan Sarjana (S1). Namun saat ini, pegawai dirasa masih kurang memadai dalam pengembangan KUD. Dalam kenyataannya, para pegawai KUD memang mendukung kegiatan pemberdayaan istri nelayan, namun dukungan tersebut kurang memberikan kontribusi yang jelas terhadap program pemberdayaan ini, terlihat dengan semakin berkurangnya anggota kelompok ibu-ibu yang bergabung untuk memproduksi abon ikan tuna.

c. Dukungan Dinas Terkait

Sesuai dengan data pengamatan lapangan, dapat diketahui bahwa peran Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Malang kurang menunjang proses pemberdayaan istri nelayan di Sendangbiru karena DKP Kabupaten Malang belum melakukan pemberdayaan istri nelayan secara maksimal. Program pemberdayaan ini memang sudah seharusnya dilakukan secara bertahap karena dalam hal ini istri nelayan mendapatkan pengetahuan baru sehingga membutuhkan proses yang bertahap agar mereka dapat memahami kegiatan pemberdayaan tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Sulistiyani (2007, h.83) bahwasanya pemberdayaan merupakan proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung bertahap.

DKP sebagai pihak yang berkewajiban untuk memberdayakan istri nelayan seharusnya dapat terus mendampingi para istri nelayan sampai mereka mampu untuk mandiri dan mengembangkan potensinya agar kesejahteraan ekonominya dapat tercapai, seperti yang dikemukakan Sumodiningrat dalam Sulistiyani (2007, h.78), bahwasanya suatu pemberdayaan dalam masyarakat tidak akan bersifat selamanya, melainkan pemberdayaan tersebut berlangsung sampai masyarakat dirasa mampu untuk hidup mandiri namun tetap dipantau dari kejauhan agar bisa tetap stabil dan tidak terjatuh lagi.

Namun kegiatan pelatihan tersebut hanya dilakukan sekali saja, tidak dilakukan secara berkelanjutan. Seiring berjalannya waktu para anggota kelompok mulai tidak mampu untuk melanjutkan usaha untuk memproduksi abon ikan tuna tersebut, hal ini terbukti dengan adanya beberapa kelompok yang memutuskan untuk berhenti memproduksi abon ikan tuna karena

mereka tidak mampu untuk mengembangkan modalnya dengan baik, sehingga pada saat ini hanya tersisa dua kelompok saja yang bertahan dalam produksi abon ikan tuna tersebut.

Agar program pemberdayaan tersebut dapat berhasil, seharusnya pemerintah daerah setempat dan pihak-pihak yang terkait dapat lebih melaksanakan tahap-tahap pemberdayaan secara serius dengan menekankan pada proses pemberdayaan yang terdiri dari beberapa tahap, seperti yang dikemukakan oleh Wrihatnolo (2007, h.1), dengan menekankan pada proses, maka pemberdayaan masyarakat memiliki tahap-tahap yang terdiri dari penyadaran yang dilakukan dengan mengadakan sosialisasi terhadap komunitas agar mereka mengerti bahwa kegiatan pemberdayaan ini penting bagi peningkatan kualitas hidup mereka dan dilakukan secara mandiri, yang kedua adalah pengkapa-sitan yang sering disebut sebagai *capacity building*, yang terdiri atas pengkapa-sitan manusia, organisasi, dan sistem nilai, serta yang ketiga pendayaan yaitu masyarakat diberikan daya, kekuasaan, dan peluang sesuai dengan kecakapan yang sudah diperolehnya.

d. Sikap Istri Nelayan (Dukungan Anggota KUD)

Dukungan dari para istri nelayan sangat penting bagi keberhasilan program pemberdayaan ini namun dalam kenyataannya sebagian besar nelayan menganggap hal itu tidak penting sehingga mereka melarang istri mereka untuk mengikuti pelatihan. Tingkat pendidikan yang rendah sangat berpengaruh pada pola pikir masyarakat nelayan. Selain itu modal yang dimiliki juga terbatas sehingga proses produksi abon tuna menjadi terhambat bahkan dapat terhenti karena modal produksi yang kurang. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Hakim (2012), bahwa faktor yang menjadi kendala dalam upaya pemberdayaan salah satunya adalah masyarakat nelayan yang menjadi sasaran pemberdayaan umumnya merupakan nelayan tradisional yang tergolong masyarakat berpendidikan dan berpenghasilan rendah.

Padahal dukungan atau partisipasi dari masyarakat dalam suatu pemberdayaan sangat penting, karena masyarakat merupakan subyek dari pemberdayaan itu sendiri, selain itu yang menentukan keberhasilan pemberdayaan adalah adanya partisipasi masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh Kusnadi dikutip oleh Widayati (2008, h.31) bahwa indikator yang menandai bahwa masyarakat memiliki keberdayaan salah satunya adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dan tumbuhnya kesadaran warga terhadap persoalan-persoalan pembangunan yang ada di kawasan pesisir.

Kesimpulan

KUD Mina Jaya memiliki fungsi yakni mengatur sistem pendapatan hasil tangkap nelayan Pantai Sendangbiru. Peran lainnya ialah memberdayakan masyarakat nelayan dengan membantu nelayan beserta istrinya agar memiliki kemampuan untuk mengolah ikan tuna hasil tangkapan menjadi produk makanan yang memiliki nilai jual sehingga dapat menambah penghasilan serta meningkatkan kesejahteraan mereka di kala tidak musim melaut. Adanya dua kelompok produsen abon ikan tuna merupakan wujud dan hasil pemberdayaan istri nelayan oleh KUD Mina Jaya.

Kendala yang dialami dalam proses pemberdayaan istri nelayan tersebut diantaranya adalah dana yang diberikan sebagai modal awal produksi oleh KUD Mina Jaya dan Dinas

Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Malang jumlahnya terbatas, sosialisasi dan pelatihan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) bagi istri nelayan hanya dilakukan satu kali dan tidak berkelanjutan, kemampuan KUD yang masih terbatas tidak disertai dengan dukungan yang baik dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Malang sehingga program pemberdayaan istri nelayan di kawasan Sendang Biru berjalan kurang maksimal, serta istri nelayan yang merupakan subyek utama dalam program pemberdayaan nyatanya kurang memahami maksud dari KUD Mina Jaya, sebab dengan rendahnya sumber daya manusia (SDM) yang mereka miliki membuat pola pikir menjadi sempit dan menganggap program tersebut sebagai sesuatu yang terlalu rumit dan menghabiskan banyak tenaga juga waktu.

Daftar Pustaka

- Anhakim (2008) Sebuah Tinjauan: Beberapa Kendala Pemberdayaan Masyarakat Perikanan. **Anhakim Weblog** 12 Oktober [Internet blog] Available from: <<http://anhakim.wordpress.com/2008/01/08/sebuah-tinjauan-beberapa-kendala-pemberdayaan-masyarakat-perikanan/>> [Accessed 12 October 2012].
- Anoraga, Pandji dan Widiyanti, Ninik. (1993) **Dinamika Koperasi**. Jakarta, Rineka Cipta.
- Miles, B. Matthew dan Huberman, A. Michael. (1992) **Analisis Data Kualitatif**. Jakarta, Universitas Indonesia.
- Pramono, Djoko. (2005) **Budaya Bahari**. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. (2007) Konseptual Model Pemberdayaan LSM sebagai Fasilitator Pembangunan. **Jurnal Kebijakan Administrasi Publik**, 11 (2), November, pp. 139-157.
- Suryono, Agus. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang, UM Press.
- Widayati, Tri. (2008) **Analisis Efisiensi Teknis Tempat Pelelangan Ikan dan Tingkat Keberdayaan Pengelola Tempat Pelelangan Ikan serta Strategi Pemberdayaannya di Wilayah Pantai Utara Jawa Tengah**. [Internet], Semarang, Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang. Available from: Netlibrary <<http://www.google.com>> [Accessed: 28 September 2012]
- Wrihatnolo, Randy R dan Riant Nugroho. (2007) **Manajemen Pemberdayaan, Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat**. Jakarta, Gramedia.